

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan bisnis di dunia telah mengalami kemajuan yang pesat, khususnya di Indonesia yang saat ini telah memasuki era globalisasi. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya dunia usaha. Perkembangan dunia usaha ini menyebabkan tajamnya persaingan, oleh sebab itu perusahaan harus mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya sekaligus berkembang sesuai dengan visi, misi dan tujuannya.

Perkembangan bisnis menyebabkan perusahaan akan melakukan berbagai strategi dan usaha untuk memenangkan persaingan diantara perusahaan agar berjalan sesuai dengan tujuannya. Untuk melakukan usaha tersebut, perusahaan membutuhkan dana yang cukup besar baik berupa dana yang berasal dari modal sendiri yaitu dari modal saham maupun dari pihak eksternal yaitu utang. Dalam memperoleh dana tersebut, tentunya akan ada biaya yang digunakan untuk bunga yang disebut dengan biaya modal dan biaya hutang.

Kreditur selaku pihak eksternal, sebelum meminjamkan dana harus memperhatikan atau mempertimbangkan resiko-resiko yang akan dihadapi. Maka dari itu, selaku kreditur harus mengetahui tinggi rendahnya resiko dari kondisi pasar perusahaan tersebut. Berikut adalah hasil penelitian dari Survey Jetro mengenai beberapa negara yang memiliki resiko tinggi :

Arti Resha Novianti, 2014

Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Tabel 1.1
Resiko Pada Beberapa Negara

	<i>Inadoquate Infrastructur</i>	<i>Undeveloped legal system and problems in application of laws</i>	<i>High or rising labor costs</i>	<i>Tax risks and problems</i>	<i>Labor difficulties</i>
China	11.6%	45.1%	49.5%	23.2%	34.1%
Thailand	10.5%	6.5%	30.1%	5.6%	12.7%
Malaysia	10.0%	6.8%	15.9%	4.9%	9.3%
Indonesia	36.4%	27.2%	21.0%	13.7%	22.1%
India	56.8%	29.6%	7.9%	15,0%	23.7%
Myanmar	60.4%	39.3%	3.3%	9.3%	9.6%

Sumber : Survey Jetro 2013

Berdasarkan hasil penelitian, suatu negara dikategorikan memiliki resiko tinggi apabila memiliki persentase melebihi 20%. Dilihat dari infrastruktur Indonesia beresiko tinggi sebesar 36.4%, legal sytem di Indonesia yang masih sangat lemah yaitu 27.2%, masalah biaya tenaga kerja yang jauh lebih besar dibandingkan dengan India dan Myanmar sebesar 21.0%, 13.7% untuk masalah dan risiko pajak, serta kesulitan tenaga kerja sebesar 22.1%. Indonesia memiliki resiko yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan Malaysia dan Thailand yang memiliki rata-rata persentase resiko dibawah 20%. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia termasuk negara *High Risk*.

Gubernur BI secara eksplisit menyoroti keterkaitan antara ketersediaan pembiayaan dan tingginya suku bunga kredit, yang seolah menegaskan bahwa hambatan pembiayaan di Indonesia adalah disebabkan oleh tingginya suku bunga

Arti Resha Novianti, 2014

Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kredit. Tingginya ongkos pembiayaan di Indonesia tecermin pada suku bunga Kredit Modal Kerja (KMK) yang sebesar 12 persen (November 2011), meskipun suku bunga acuan (BI Rate) sudah mencapai 6 persen. Sebagai perbandingan, di Malaysia dan Filipina, dengan suku bunga acuan masing-masing 3 persen dan 4,5 persen (*reverse repo*), dan tingkat suku bunga kredit bank hanya 6,5 persen dan 5,7 persen (Oktober 2011). (korantempo, 30 Januari 2012)

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa bunga kredit di Indonesia mencapai 10%, sementara di Malaysia hanya 2%. Sangat jelas bahwa Indonesia yang memiliki risiko investasi yang tinggi maka tingkat bunga yang didapat pun jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia, berbeda dengan Malaysia dengan tingkat risiko yang rendah akan mendapatkan tingkat bunga yang rendah pula (detikFinance, 18 Mei 2013). Apabila suatu negara termasuk negara *High Risk*, maka biaya hutang yang ditetapkan oleh kreditur pun akan semakin tinggi. Biaya hutang menurut Nurauliawati (2010) adalah tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemberi pinjaman.

Pada praktiknya dalam perhitungan pajak, perusahaan melakukan upaya-upaya agar pajak yang dikeluarkan sesuai dengan harapan perusahaan. Maka, banyak perusahaan yang melakukan manajemen pajak (*tax planning*). Ada dua cara dalam melakukan manajemen pajak yaitu, penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Dyreng (2008) penghindaran pajak merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak, baik kegiatan

diperbolehkan oleh pajak atau kegiatan khusus untuk mengurangi pajak. Praktek penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan celah undang-undang, perusahaan dapat memanfaatkan *deductible expense* untuk memperkecil pajak. Salah satu cara memanfaatkan *deductible expense* adalah dengan menggunakan biaya hutang/biaya bunga. Ross (2005) menyatakan bahwa biaya hutang bukan kepemilikan dari perusahaan, biaya hutang merupakan biaya bisnis yang bisa menjadi pengurang dalam pajak (*tax deductible*).

Penggunaan sumber dana yang dilakukan oleh perusahaan, menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Apakah perusahaan melakukan pendanaan berasal dari modal sendiri yaitu dari modal saham dan laba ditahan atau dari pihak eksternal yaitu utang. Dengan penggunaan utang sebagai sumber dana, dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.

Perusahaan Manufaktur adalah perusahaan yang kegiatannya memproduksi barang. Sehingga untuk mempertahankan pangsa pasar, melakukan biaya pengembangan produk baru serta pengujian dibutuhkan dana yang besar. Apabila permodalan dari perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan akan meminjam dana dari kreditur.

Krisis ekonomi global tahun 2008 berdampak besar pada pertumbuhan sektor manufaktur. Industri manufaktur yang tumbuh hingga 4,7 persen tahun

Arti Resha Novianti, 2014

Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2007 melambat menjadi 2,1 persen tahun 2009. Industri manufaktur nonmigas yang tumbuh 5,1 persen tahun 2007 kini hanya 2,5 persen. Melambatnya permintaan global memunculkan kekhawatiran adanya penyusutan jumlah perusahaan manufaktur. Dari 29.000 perusahaan manufaktur skala menengah dan besar pada tahun 2006, diprediksi "hanya" ada 27.000 perusahaan yang masih beroperasi pada tahun 2008. Tidak hanya manufaktur skala besar, industri skala mikro dan kecil pun anjlok 2,1 persen dan 5 persen dihantam krisis tahun 2008. (<http://bisniskeuangan.kompas.com>)

Tren penurunan daya saing Industri Manufaktur nasional terekam dalam banyak laporan dan kajian perbandingan daya kompetitif internasional. *International Institute for Management Development (IMD)* dalam *World Competitiveness Report 2004*, misalnya, menempatkan Indonesia pada posisi ke-58 dari 60 negara yang diteliti. Peringkat ini turun dari posisi ke-43 pada 2000, serta posisi ke-46 pada 2001. Penurunan dan rendahnya daya saing perekonomian nasional serta Sektor Manufaktur menurut catatan IMD disebabkan setidaknya oleh 5 faktor: *Pertama*, kinerja perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan dan stabilitas harga yang buruk. *Kedua*, inefisiensi kelembagaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara/ fiskal. *Ketiga*, banyaknya peraturan dan perundang-undangan yang kurang kondusif bagi dunia usaha. *Keempat*, rendahnya produktivitas dunia usaha akibat pasar tenaga kerja yang tidak optimal, akses ke sumber keuangan, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif masih kurang menunjang. *Kelima*, masih terbatasnya infrastruktur, baik infrastruktur

Arti Resha Novianti, 2014

Pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

fisik, teknologi maupun infrastruktur dasar lain yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

Pemerintah menyebut pertumbuhan sejumlah sektor industri manufaktur nasional diperkirakan akan mengalami penurunan di semester I-2012. Dirjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Panggah Susanto menjelaskan, pihaknya belum mengetahui berapa besar angka penurunan itu. Menurutnya, sektor baja menurun karena terjadi kelangkaan bahan baku, sedangkan untuk pertumbuhan sektor tekstil, dipengaruhi oleh permintaan ekspor yang menurun. Kondisi itu, terjadi karena perlambatan ekonomi di dunia. (www.okezone.com)

Kinerja industri manufaktur kuartal ketiga 2012 mengalami perlambatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan produksi sektor manufaktur dalam setahun hanya 3,61%. Pertumbuhan ini turun drastis, dari pertumbuhan produksi manufaktur kuartal ketiga 2012 terhadap kuartal ketiga 2011 yang tumbuh 7,57%. BPS mencatat beberapa bidang manufaktur menunjukkan pertumbuhan negatif, seperti furniture yang merosot 15,85%, tekstil yang anjlok 15,38%, serta industri mesin dan peralatannya yang turun 12,94%. Selain itu, penurunan produksi juga terjadi di sektor kulit, barang dari kulit, dan alas kaki sebesar 9,67%. Lalu industri kertas dan barang dari kertas turun sebesar 8,38% dan logam dasar juga turun 1,84%. (www.kemenperin.go.id).

Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan bahwa penurunan pada perusahaan manufaktur sangat signifikan. Sehingga hal tersebut menyebabkan risiko tinggi

bagi para kreditur, dan berdampak pada suku bunga yang tinggi pula. Dari fenomena - fenomena diatas maka peneliti akan meneliti perusahaan manufaktur sebagai subjek penelitian ini.

Hasil penelitian Indah Masri (2012) pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada tahun 2008-2010 menunjukkan pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* adalah positif. Kreditur memandang penghindaran pajak tersebut sebagai resiko sehingga perilaku *tax avoidance* justru meningkatkan *cost of debt*. Namun muncul hasil yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Hasil penelitian Widya Sartika (2012) pada perusahaan manufaktur yang tercatat pada BEI pada tahun 2008 – 2010 menunjukkan penghindaran pajak dan biaya hutang berpengaruh negatif. Adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan isu ini menjadi topik yang penting dan menarik untuk diteliti kembali.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan menggunakan judul **“Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Biaya Hutang (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi permasalahan penelitian ini terfokus pada:

1. Bagaimana gambaran penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 ?
2. Bagaimana gambaran biaya hutang pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 ?
3. Apakah penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran Penghindaran pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.
2. Untuk mengetahui gambaran Biaya hutang pada perusahaan Manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.
3. Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010-2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu perpajakan, akuntansi keuangan dan manajemen keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan biaya utang.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pihak Perusahaan / Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berarti dalam mengevaluasi kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan.

b. Bagi Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada calon investor mengenai seberapa besar pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan modalnya.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.